

STRATEGI PENGUATAN EKOSISTEM KOPERASI MELALUI EFISIENSI PENGELOLAAN KOPERASI TIDAK AKTIF DI KOTA SURABAYA

Tasya Sahla Putri Vanesia ^a

Kustini Kustini ^b

^{ab} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jawa Timur, Kode Pos 60294

Email: tasyavanesia08@gmail.com ^a; kustini.ma@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan bergantung pada ekosistem koperasi yang sehat. Namun, dua kendala utama yang menghambat pembangunan ekosistem di Surabaya adalah koperasi yang tidak aktif dan ketidakpatuhan dalam melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat strategi pengelolaan koperasi tidak aktif yang efektif untuk meningkatkan lingkungan koperasi di Kota Surabaya. Melalui keterlibatan langsung dalam proses monitoring koperasi yang tidak melaporkan RAT dan mendukung pembubaran koperasi tidak aktif sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Surabaya, tujuan ini dicapai. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi tidak melaporkan RAT karena kurangnya kemampuan manajemen dan partisipasi anggota yang rendah. Setelah melalui tahap verifikasi administrasi, penilaian aset, dan konsultasi dengan pengurus, sebanyak 303 koperasi tidak aktif berhasil dibubarkan. Hasilnya menunjukkan bahwa ada beberapa strategi untuk meningkatkan ekosistem koperasi melalui efisiensi pengelolaan koperasi tidak aktif. Strategi-strategi ini termasuk (1) digitalisasi pelaporan RAT untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (2) merevitalisasi pembinaan koperasi yang berpotensi, dan (3) meningkatkan sinergi antara koperasi dan dinas koperasi dalam hal pengawasan dan pendampingan. Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi yang tidak aktif dapat sangat membantu dalam membangun lingkungan koperasi yang lebih berkelanjutan yang dapat membantu perekonomian lokal.

Keywords: *koperasi, monitoring, pembubaran, strategi*

I. PENDAHULUAN

Koperasi adalah salah satu lembaga ekonomi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional. Sebagai jenis usaha yang didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dan kekeluargaan, koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi dapat beroperasi dengan cara yang memberdayakan anggotanya, sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh segelintir

orang, tetapi tersebar merata di seluruh anggota dan masyarakat. Munkner (2001) menjelaskan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berusaha meningkatkan kualitas hidup anggota melalui prinsip-prinsip yang adil dan setara. Koperasi memiliki potensi besar untuk menciptakan kesejahteraan, menurut Munkner (2001). Namun, keberhasilan manajemen dan partisipasi anggota adalah kuncinya.

Meskipun koperasi memiliki banyak potensi, berbagai masalah internal dan eksternal sering kali menghalangi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Manajemen yang tidak efektif, partisipasi anggota yang rendah, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi adalah beberapa masalah yang muncul. Seringkali, koperasi tidak dapat beroperasi sebagai penggerak ekonomi dengan baik karena masalah ini. Suryana (2002) menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan koperasi adalah kurangnya kemampuan manajemen, yang menghalangi koperasi untuk beradaptasi dengan kemajuan ekonomi dan teknologi. Misalnya, koperasi memainkan peran penting dalam ekonomi kerakyatan Surabaya. Sebanyak ribuan koperasi terdaftar di Surabaya namun tidak semua koperasi aktif. Menurut data dari Dinas Koperasi Surabaya, jumlah koperasi yang tidak aktif telah meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan mencatatkan sekitar 303 koperasi yang tidak aktif pada lima tahun terakhir ini. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan efektivitas koperasi dalam menjalankan fungsi sosial-ekonominya.

Sebagian besar koperasi yang tidak aktif menghadapi banyak masalah, seperti tidak adanya kegiatan usaha yang jelas, konflik internal di antara pengurus, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban administratif seperti pelaporan RAT. RAT adalah salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap koperasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen. Ketidakpatuhan dalam pelaporan RAT dapat menunjukkan masalah yang lebih besar dalam manajemen koperasi, yaitu rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Suroso (2017), tidak melakukan pelaporan RAT dapat merusak reputasi koperasi dan memengaruhi kepercayaan anggota dan masyarakat (Suroso, 2017). Koperasi yang tidak aktif dan ketidakpatuhan dalam pelaporan RAT ini mengganggu tugasnya untuk mendorong ekonomi lokal. Menurut laporan tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, koperasi di tingkat akar rumput memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, ketidakmampuan koperasi untuk menyelesaikan tugas administratif dan operasional dapat berdampak negatif pada ekosistem ekonomi sebuah wilayah. Koperasi yang aktif dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dengan menciptakan peluang bisnis dan mengoptimalkan sumber daya lokal. Sebaliknya, koperasi yang tidak aktif menghambat peluang ini (Muflihah dan Hadi, 2020).

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah memantau koperasi yang tidak melaporkan RAT dan membubarkan mereka. Untuk mengurangi beban

administratif yang tidak perlu, pembubaran koperasi yang tidak aktif dilakukan sebagai langkah terakhir untuk merapikan data koperasi yang terdaftar. Namun, pemantauan koperasi aktif yang tidak melaporkan RAT tetap menjadi prioritas utama. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengawasi kepatuhan koperasi terhadap regulasi, tetapi juga untuk mengevaluasi seberapa efektif pengelolaan koperasi saat ini. Memang penting untuk membubarkan koperasi yang tidak aktif, tetapi itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan hak-hak anggota koperasi tersebut.

Meskipun tindakan ini diambil, pemantauan dan pembubaran koperasi tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Pendekatan yang lebih terpadu dan efektif diperlukan untuk menciptakan lingkungan koperasi yang sehat dan berkelanjutan, termasuk meningkatkan kemampuan manajer dan meningkatkan partisipasi anggota. Proses pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Surabaya dapat membantu menemukan masalah utama dalam pengelolaan koperasi, seperti ketidakmampuan manajer untuk menjalankan operasi atau rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong koperasi agar dapat melakukan fungsi sosial dan ekonominya dengan lebih baik, selain mengawasi administrasi.

Secara umum, untuk membuat koperasi lebih aktif dan produktif, diperlukan kolaborasi yang kuat antara anggota, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Koperasi akan kesulitan menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi dan pemberdaya masyarakat jika tidak diawasi dan dikelola dengan baik. Akibatnya, perbaikan ekosistem koperasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan manajemen, regulasi, dan partisipasi anggota koperasi.

II. KAJIAN TEORI

Konsep Koperasi dan Peranannya dalam Ekonomi

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang didirikan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang berlandaskan prinsip koperasi. Prinsip-prinsip seperti solidaritas, demokrasi, dan keadilan termasuk dalam konsep ini. Koperasi memberikan akses kepada anggota untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara bersama-sama, menjadikannya instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi lokal. Koperasi sering menjadi motor penggerak dalam sektor ekonomi informal di Indonesia, membantu masyarakat yang tidak dilayani oleh institusi keuangan formal. Tetapi keberhasilan koperasi dalam memenuhi fungsinya sangat bergantung pada kualitas manajemennya. Dibutuhkan pendekatan strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan koperasi agar lebih menguntungkan anggota dan masyarakat secara keseluruhan.

Koperasi Tidak Aktif : Masalah dan Dampaknya terhadap Ekosistem Koperasi

Seringkali, pemerintah daerah, termasuk Kota Surabaya, menghadapi masalah koperasi tidak aktif. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa koperasi tidak aktif biasanya ditandai dengan pengurus yang tidak dapat mengelola operasi koperasi dengan baik, rendahnya partisipasi anggota, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban administratif seperti pelaporan RAT. Faktor internal seperti konflik internal, manajemen yang buruk, dan pengurus yang tidak kompeten sering kali menjadi penyebabnya.

Jumlah koperasi yang tidak aktif memengaruhi ekosistem koperasi secara keseluruhan. Karena memerlukan pengawasan tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, koperasi yang tidak aktif menimbulkan beban administratif bagi pemerintah. Selain itu, koperasi yang tidak aktif memiliki potensi untuk menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi secara keseluruhan, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan koperasi yang aktif dan produktif. Oleh karena itu, pembubaran koperasi yang tidak aktif adalah langkah strategis untuk menjaga ekosistem koperasi tetap sehat dan memungkinkan koperasi yang lebih potensial untuk berkembang.

Efisiensi dalam Pengelolaan Koperasi

Salah satu komponen penting dalam pengelolaan koperasi adalah efisiensi. Dalam hal ini, efisiensi mengacu pada kemampuan koperasi untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Robbins dan Coulter (2018), efisiensi adalah ukuran sejauh mana organisasi dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya secara hemat. Dalam koperasi, efisiensi dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, penggunaan teknologi, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas pengurus.

Di era digital saat ini, teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan koperasi. Misalnya, digitalisasi pelaporan RAT dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses pelaporan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengurus kepada anggota. Selain itu, salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan adalah dengan memberikan pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi pengurus koperasi, khususnya bagi koperasi yang masih aktif tetapi menghadapi kendala operasional.

Penguatan Ekosistem Koperasi

Ada berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekosistem koperasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan koperasi. Porter (1990) menyatakan bahwa sinergi antara pelaku usaha, kebijakan pemerintah, dan inovasi yang berkelanjutan adalah tanda ekosistem ekonomi yang sehat. Penguatan ekosistem dalam koperasi mencakup pembinaan dan pengembangan koperasi, peningkatan regulasi, dan pengawasan yang lebih baik.

Strategi dapat digunakan untuk meningkatkan ekosistem koperasi di Surabaya. Ini termasuk membubarkan koperasi yang tidak aktif untuk menertibkan data dan mengurangi beban administratif, dan mendorong koperasi yang masih aktif untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional. Pendekatan strategis juga mencakup pembinaan koperasi yang berpotensi dengan memberikan pelatihan tentang manajemen koperasi, tata kelola keuangan, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, membangun kolaborasi antara koperasi, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting. Sementara koperasi dan anggotanya bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas manajemen dan mematuhi undang-undang, pemerintah daerah dapat bertanggung jawab untuk menyediakan regulasi yang mendukung dan melakukan pengawasan yang intensif. Oleh karena itu, lingkungan koperasi Surabaya dapat menjadi lebih sehat, efektif, dan berkelanjutan.

Relevansi Pengelolaan Koperasi Tidak Aktif terhadap Penguatan Ekosistem Koperasi

Pengelolaan koperasi tidak aktif, seperti pemantauan dan pembubaran, tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga sebagai bagian dari rencana untuk memperkuat ekosistem koperasi secara keseluruhan. Dengan mengurangi jumlah koperasi yang tidak aktif, ekosistem koperasi menjadi lebih tertata, dan koperasi yang aktif dan produktif dapat memperoleh dukungan pemerintah yang lebih baik. Selain itu, pengelolaan koperasi yang tidak aktif memberikan pelajaran penting bagi koperasi lain untuk mematuhi regulasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan memperkuat peran mereka dalam perekonomian lokal. Selain itu, ini menumbuhkan kepercayaan baru terhadap koperasi sebagai instrumen ekonomi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Surabaya untuk melakukan monitoring terhadap koperasi tidak aktif dan koperasi yang tidak melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta mendukung proses pembubaran koperasi tidak aktif. Fokus kegiatan adalah mengidentifikasi kondisi koperasi sasaran di lapangan, melaporkan hasil monitoring kepada ketua tim kerja pengawasan, dan memastikan keberadaan koperasi sesuai dengan data administratif yang ada.

Tahap Persiapan

Tahap ini mencakup langkah-langkah awal untuk memastikan kelancaran kegiatan di lapangan :

1. Koordinasi dengan Dinas Koperasi Surabaya

Dilakukan kerja sama dengan tim di Dinas Koperasi untuk mendapatkan pemahaman tentang alur proses pengawasan koperasi yang tidak aktif serta prosedur

pembubaran koperasi. Dalam kasus ini, koperasi sasaran diidentifikasi dengan menggunakan data administrasi yang tersedia. Status koperasi dapat termasuk tidak melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau tidak beroperasi selama lebih dari tiga tahun. Koperasi yang membutuhkan pembinaan lebih lanjut atau pembubaran dapat diidentifikasi melalui proses ini. Data yang dikumpulkan melalui proses ini digunakan untuk membuat kebijakan yang tepat untuk setiap koperasi yang diidentifikasi, yang membuat tindakan yang diambil lebih terarah dan efektif. Selain itu, pengawasan yang menyeluruh dan berbasis data memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan berdampak positif pada pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi.

2. Identifikasi koperasi sasaran

Data koperasi sasaran dianalisis untuk menentukan mana yang harus menjadi prioritas dalam proses pengawasan, dengan mempertimbangkan hal-hal seperti koperasi yang menghadapi tantangan administratif yang signifikan atau koperasi yang sulit dijangkau. Analisis ini memungkinkan untuk menentukan koperasi mana yang memerlukan lebih banyak perhatian untuk membuat tindakan yang diambil lebih konsentrasi dan efektif. Selain itu, data alamat koperasi diverifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan sesuai dengan keadaan di lapangan. Untuk menghindari kesalahan dalam penentuan lokasi atau kondisi koperasi, langkah ini sangat penting. Ini memungkinkan proses pemantauan dilakukan dengan lebih akurat dan efisien. Setiap tindakan yang diambil berdasarkan data yang dikumpulkan menjadi lebih dapat diandalkan dan tepat sasaran setelah verifikasi ini.

3. Perencanaan jadwal kegiatan

Jadwal monitoring dan pembubaran dibuat oleh tim dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan lokasi koperasi sasaran. Tujuan dari penyusunan jadwal ini adalah agar kegiatan lapangan dapat berlangsung secara sistematis dan terarah, memastikan bahwa setiap koperasi yang menjadi sasaran dapat dipantau dengan baik dan tepat waktu. Perencanaan yang baik memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih efisien dan mengurangi pemborosan waktu, sehingga proses monitoring dan pembubaran menjadi lebih efisien.

Tahap Pelaksanaan

1. Monitoring koperasi

Untuk melacak koperasi yang tidak melaporkan RAT, perlu dilakukan kunjungan langsung ke alamat koperasi yang tercantum dalam data Dinas Koperasi. Selama monitoring, koperasi diperiksa secara menyeluruh. Ini mencakup kantor, aktivitas operasional, dan masalah yang dihadapi pengurus koperasi. Pengamatan ini memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi koperasi tersebut. Selain itu,

pengurus koperasi diwawancarai untuk mengetahui alasan mengapa mereka tidak berpartisipasi atau tidak melaporkan RAT. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini sangat penting untuk melengkapi data saat ini dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi koperasi. Metode ini memungkinkan perencanaan langkah-langkah selanjutnya dalam pembinaan atau pembubaran yang lebih tepat dan efisien.

2. Pembubaran koperasi tidak aktif

Selama proses pembubaran koperasi, alamat koperasi harus diperiksa sesuai dengan data administrasi. Selama kunjungan, dilakukan tanya jawab dengan pengurus dan warga sekitar di lokasi untuk memastikan bahwa koperasi masih ada dan beroperasi. Informasi ini dicatat sebagai bukti yang diperlukan untuk proses pembubaran jika perusahaan tidak lagi beroperasi atau tidak ditemukan di alamat yang tercantum. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat didasarkan pada data yang akurat dan akurat, sehingga proses pembubaran dapat dilakukan dengan benar.

3. Pelaporan hasil monitoring kepada ketua tim kerja pengawasan

Laporan yang menggabungkan temuan observasi, wawancara, dan verifikasi di lapangan dibuat setelah proses monitoring selesai. Selanjutnya, laporan ini dikirim ke ketua tim kerja pengawasan untuk evaluasi dan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi. Proses pelaporan ini mencakup informasi detail tentang kondisi koperasi, lokasi, dan status operasionalnya, memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi koperasi saat ini. Lebih banyak pembinaan, pembubaran, atau keputusan lain yang diperlukan untuk mengelola koperasi dengan baik didasarkan pada laporan ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kondisi Koperasi Tidak Aktif di Surabaya

Kondisi koperasi yang tidak aktif di Surabaya sangat beragam, dan ini menunjukkan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh koperasi untuk bertahan hidup. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa banyak koperasi, meskipun mereka terdaftar secara resmi dalam database Dinas Koperasi, tidak lagi beroperasi seperti sebelumnya. Beberapa koperasi yang seharusnya aktif mengawasi dana dan kegiatan anggotanya tidak memiliki kantor fisik yang jelas atau bahkan tidak terdaftar. Sebagian lainnya hanya memiliki nama, dan pengurusnya sudah tidak ada lagi atau bahkan tidak diketahui.

Ketidaktifan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan koperasi untuk mengelola sumber daya manusia dengan baik, kehadiran pengurus yang

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen koperasi, dan kurangnya partisipasi aktif dari anggota koperasi itu sendiri. Banyak koperasi didirikan dengan niat baik, tetapi mereka menghadapi kesulitan untuk beroperasi karena tidak memiliki manajemen yang baik. Ini belum lagi kurangnya pelatihan dan bimbingan yang memadai dari pemerintah atau lembaga terkait. Selain itu, masalah pendanaan dan pergeseran ekonomi yang tidak terduga adalah hambatan utama bagi kelangsungan koperasi.

Tidak hanya pengurus dan anggota yang dirugikan oleh ketidakaktifan ini, tetapi juga seluruh lingkungan koperasi. Sangat penting untuk segera menangani koperasi yang tidak aktif dengan langkah-langkah yang tepat agar tidak menambah beban administrasi bagi pihak terkait. Ini karena data koperasi yang tidak terbaru atau tidak valid akan sulit untuk dipantau dan dievaluasi.

Dampak Koperasi Tidak Aktif terhadap Ekosistem Koperasi

Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, keberadaan koperasi yang tidak aktif berdampak buruk pada komunitas koperasi. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi anggota adalah salah satu efeknya. Apabila koperasi tidak aktif atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya, fungsinya akan hilang, karena tujuan sebenarnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Koperasi menjadi kurang dipandang masyarakat, terutama calon anggota, karena kurangnya aktivitas.

Selain itu, karena anggota tidak melihat manfaat nyata dari keberadaan koperasi, kepercayaan mereka terhadapnya berkurang. Akibatnya, anggota cenderung tidak ikut serta dalam kegiatan koperasi, yang pada akhirnya menyebabkan koperasi semakin tidak aktif. Selain itu, koperasi yang tidak aktif menyebabkan data dalam sistem administrasi koperasi menjadi salah. Karena data yang mereka miliki tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, Dinas Koperasi dan lembaga terkait lainnya akan kesulitan menyusun kebijakan yang sesuai. Jika data koperasi tidak akurat, memberikan bantuan, bantuan, atau subsidi kepada koperasi yang membutuhkan akan tidak tepat sasaran. Proses pendampingan atau bantuan terhambat, dan koperasi yang berpotensi berkembang terabaikan. Oleh karena itu, langkah awal yang sangat penting untuk memastikan ekosistem koperasi tetap berfungsi dengan baik adalah pembaruan data koperasi yang tidak aktif.

Efisiensi Pengelolaan Koperasi Tidak Aktif melalui Monitoring dan Verifikasi

Pendekatan yang terstruktur untuk melakukan pengawasan dan verifikasi di lapangan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan koperasi tidak aktif. Saya memiliki peran langsung dalam memastikan bahwa keadaan koperasi yang terdaftar di Dinas

Koperasi sesuai dengan keadaan di lapangan selama kegiatan ini. Proses monitoring memeriksa kondisi koperasi secara langsung, bukan hanya data administrasi. Dengan melakukan monitoring, Dinas Koperasi dapat memastikan bahwa koperasi tidak beroperasi di alamat yang terdaftar atau bahwa masih ada aktivitas yang berlangsung, meskipun dalam skala kecil. Sangat penting untuk melakukan verifikasi lapangan ini untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari koperasi, apakah mereka aktif atau hanya mengalami kendala sementara. Dalam beberapa situasi, pengurus koperasi dapat menjelaskan masalah yang mereka hadapi, seperti kekurangan dana atau kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi dengan baik.

Selain itu, kegiatan verifikasi ini menawarkan solusi kepada koperasi yang mungkin masih memiliki potensi untuk beroperasi kembali, seperti melakukan pembinaan atau memberikan pelatihan kepada pengurusnya. Di sisi lain, koperasi yang tidak beroperasi lagi dapat segera diusulkan untuk dibubarkan, sehingga data di Dinas Koperasi menjadi lebih akurat dan dapat digunakan untuk merencanakan kebijakan yang lebih baik. Setelah melakukan monitoring dan verifikasi di lapangan, petugas membuat laporan yang mencakup hasil dan temuan yang ditemukan. Laporan ini kemudian dikirim ke ketua tim kerja pengawasan, yang akan menganalisis hasil dan menentukan tindakan selanjutnya. Proses pelaporan yang terorganisir ini memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada data yang akurat dan valid.

Strategi Penguatan Ekosistem Koperasi

Berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi yang telah dilakukan, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat ekosistem koperasi di Surabaya, sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Data Koperasi Secara Berkala, Pemutakhiran secara berkala memastikan bahwa Dinas Koperasi memiliki gambaran yang jelas tentang kondisi koperasi yang ada. Ini karena dengan melakukan pemutakhiran secara berkala, setiap koperasi yang tidak beroperasi dapat dihapus dari daftar koperasi yang ada, yang menghindari distorsi data. Untuk melakukan pemutakhiran ini, pengurus koperasi dan pihak terkait lainnya harus melakukan pengawasan rutin.
2. Peningkatan Partisipasi Anggota dalam Koperasi, Keterlibatan aktif anggota sangat penting untuk kelangsungan hidup koperasi, jadi penting untuk meningkatkan partisipasi anggota melalui kegiatan yang bermanfaat dan relevan bagi mereka. Untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang keuntungan koperasi, dapat dilakukan pelatihan dan seminar. Melibatkan anggota dalam pengelolaan koperasi, seperti mengadakan RAT rutin atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka.

3. Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Aktif, Koperasi yang masih beroperasi tetapi menghadapi masalah administrasi atau manajerial harus mendapatkan bimbingan dan pendampingan untuk meningkatkan pengelolaan mereka. Pelatihan tentang pengelolaan koperasi yang efektif, pengelolaan keuangan yang transparan, dan perencanaan jangka panjang yang dapat membantu koperasi tetap kompetitif tersedia dari lembaga koperasi. Untuk mencegah kegagalan di masa depan, pendampingan ini sangat penting.
4. Peningkatan Efisiensi Proses Pembubaran Koperasi Tidak Aktif, Sederhanakan dan percepat proses pembubaran koperasi tidak aktif agar koperasi yang tidak beroperasi dapat dihapus dari daftar yang ada. Dengan mempercepat proses ini, Dinas Koperasi dapat mengurangi beban administratif dan memastikan data yang ada lebih akurat. Hal ini akan memudahkan perencanaan program pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mencegah kesalahan dalam penyaluran bantuan atau program yang ditujukan untuk koperasi yang aktif.

Peran Monitoring dalam Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Data Koperasi

Monitoring di lapangan sangat penting untuk mengelola data koperasi secara lebih akurat dan efisien. Dengan memeriksa kondisi koperasi secara langsung, informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan terkini, dan ini memungkinkan untuk membuat laporan yang lebih akurat tentang kinerja, manajemen, dan potensi koperasi. Laporan yang valid dan berbasis fakta membantu Dinas Koperasi membuat keputusan yang lebih baik dan tepat sasaran, terutama dalam hal kebijakan atau pembinaan. Selain itu, monitoring lapangan membantu menemukan koperasi yang memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga upaya pembinaan yang lebih khusus dan efisien dapat segera dilakukan.

Dinas Koperasi dapat memperbarui dan memperbaiki sistem datanya agar lebih akurat, mudah diakses, dan terorganisir dengan baik dengan bantuan monitoring yang berkelanjutan. Data yang lebih baik akan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap kebutuhan koperasi. Selain itu, pemantauan yang berkelanjutan memberikan umpan balik yang bermanfaat tentang seberapa efektif program yang dilaksanakan. Program dapat disesuaikan atau diperbaiki segera setelah masalah atau hambatan ditemukan, sehingga tujuan pembinaan koperasi dapat dicapai sepenuhnya. Secara keseluruhan, pemantauan yang rutin dan menyeluruh tidak hanya memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi koperasi tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan kinerja koperasi dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berbasis koperasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil tentang pelaksanaan dan verifikasi lapangan tentang koperasi yang tidak aktif di Kota Surabaya menunjukkan bahwa keberadaan koperasi yang tidak aktif memengaruhi ekosistem koperasi secara signifikan. Ketidakaktifan koperasi tidak hanya mengurangi peluang ekonomi bagi anggotanya, tetapi juga merusak data dan informasi di dalam organisasi, membuat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat menjadi sulit. Akibatnya, tindakan yang efektif diperlukan untuk mengelola koperasi yang tidak aktif, yang mencakup pemutakhiran data, verifikasi lapangan, dan pembubaran koperasi yang tidak beroperasi.

Pendekatan sistematis dan berbasis data yang akurat memungkinkan penguatan ekosistem koperasi melalui efisiensi pengelolaan koperasi yang tidak aktif. Dengan pembaruan data berkala dan pemantauan langsung di lapangan, Dinas Koperasi dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung koperasi yang berpotensi berkembang dengan lebih baik. Langkah penting untuk memperkuat ekosistem koperasi di Surabaya adalah pembinaan terhadap koperasi yang masih aktif dan meningkatkan partisipasi anggota. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan koperasi yang tidak aktif di Surabaya dan telah memberikan saran untuk cara mengelola koperasi dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

1. Untuk memastikan bahwa data koperasi akurat dan memudahkan pemantauan kondisi koperasi saat ini, Dinas Koperasi sebaiknya melakukan pemutakhiran data secara berkala, baik melalui pembaruan data administratif maupun monitoring lapangan. Dengan melakukan pemutakhiran data secara berkala, Dinas Koperasi dapat lebih mudah menemukan koperasi yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembinaan atau perbaikan sistem.
2. Dinas Koperasi harus secara teratur memberikan pembaruan data koperasi, baik melalui pemantauan lapangan maupun pembaruan data administratif, untuk memastikan bahwa data itu akurat dan untuk mempermudah pengawasan kondisi koperasi saat ini. Dengan melakukan pemutakhiran data secara berkala, Dinas Koperasi dapat lebih mudah menemukan koperasi yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembinaan atau perbaikan sistem.
3. Koperasi yang masih memiliki potensi untuk beroperasi kembali perlu mendapatkan bantuan lebih lanjut, seperti perencanaan usaha yang lebih jelas dan penyusunan anggaran yang realistis, agar mereka dapat kembali aktif dan berfungsi dengan baik. Pendampingan ini penting untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan agar

koperasi dapat mengatasi hambatan yang ada dan kembali berperan dalam perekonomian lokal.

4. Untuk menjaga keberlanjutan koperasi, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota. Ini terutama berlaku untuk kegiatan yang melibatkan anggota dalam pengelolaan koperasi atau dalam pengambilan keputusan penting seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dengan peningkatan partisipasi anggota, koperasi akan lebih stabil dan dapat berkembang lebih optimal, karena keputusan yang dibuat oleh anggota akan menjadi bagian dari keputusan yang dibuat oleh anggota sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Kader, M. A. (2018). PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA. *JURISMA Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995>
- Muflihah, F., & Hadi, M. (2020). *Peran Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Indonesia*. *Jurnal Koperasi dan UKM*, 9(3), 82-97.
- Munkner, H. (2001). *Cooperative Development in Developing Countries: Experiences from Asia, Africa, and Latin America*. Springer.
- Nasution, S. (2020). "Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Melalui Pelatihan Manajemen". *Jurnal Koperasi dan Perekonomian*, 15(2), 123-135.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia.
- Sartika, Partomo Tiktik. 2009. *Ekonomi Koperasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Suhartono, I. (2012). STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI BERORIENTASI BISNIS. *Among Makarti*, 4(1). <https://doi.org/10.52353/ama.v4i1.32>
- Suroso, D. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 45-60.
- Suryana, Y. (2002). *Manajemen Koperasi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thayf, H. S., Supartiningsih, S., & Syamsuddin, M. M. (2022). Koperasi Sebagai Harapan Perekonomian Masa Depan. *Coopetition Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(1), 45-54. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i1.570>

Widiyanti, N., & Sunindhia, Y. (2008). Koperasi dan perekonomian Indonesia. In *Rineka Cipta eBooks*.

https://catalog.maranatha.edu/index.php?p=show_detail&id=1058&keywords=